

BAB V

KESIMPULAN

Kerjasama antar negara adalah salah satu peluang suatu negara memenuhi kebutuhan nasionalnya. Keterbukaan negara-negara dalam pembangunan dan pengembangan yang di dorong oleh keterbatasan sumber dayanya menjadi penyebab sebuah negara menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain atas dasar memiliki tujuan untuk menyejahterakan rakyat. Seperti halnya negara berkembang yang merupakan mitra kerjasama strategis bagi negara maju seperti Amerika Serikat yang sudah sejak lama menjalin dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara salah satunya Indonesia dalam meningkatkan produktifitas perekonomian di bidang kelautan.

Indonesia salah satu negara kepulauan terbesar di Asia dan kedua di dunia yang memiliki 17.506. Indonesia merupakan jalur titik pertemuan antara Samudra Pasifik dan Samudra India serta Benua Asia dan Benua Australia, yang menghubungkan kepentingan negara-negara besar dan maju di Barat dan di Timur, di Utara dan di Selatan. Indonesia pada saat ini menempati peringkat ketiga terbesar dunia. Perairan Indonesia menyimpan 70 persen potensi minyak karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia, selain itu juga Indonesia memiliki ekosistem laut yang bagus.

Illegal Fishing adalah salah satu ancaman bagi Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah. Sejak tahun 2014-2018 sanyak 276 kapal ikan ilegal yang ditenggelamkan berbendera Vietnam atau sekitar 57% dari total. Dalam menjaga integritas wilayah dan populasi ikan di perairan Indonesia, pemerintah dengan tegas menindak kapal-kapal yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Di bawah kepemimpinan Ibu Susi Pujiastuti, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menenggelamkan 488 kapal ilegal yang tertangkap beroperasi di perairan Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 276 kapal ikan yang ditenggelamkan berbendera Vietnam atau sekitar 57% dari total. Kemudian diikuti Filipina (90 kapal) dan Thailand (50 kapal). Sementara kapal nelayan Indonesia yang ditenggelamkan sebanyak 26 kapal. Sebagai informasi, sepanjang tahun lalu KKP telah

menangkap 109 kapal ilegal. Sebanyak 29 kapal berbendera Vietnam, 7 kapal berbendera Malaysia, 5 kapal berbendera Filipina. Adapun yang berbendera Indonesia mencapai 68 kapal.

Kegiatan memerangi *illegal fishing* tersebut diwujudkan melalui pembakaran dan penembakan kapal-kapal laut asing yang masuk ke Indonesia secara ilegal. Kebijakan penembakan kapal ini merupakan strategi Jokowi dalam memberikan efek jera dan penggetar (deterrence) terhadap negara lain. Efek penggetar juga sekaligus menjadi sinyal ancaman yang berfungsi sebagai strategi pencegahan untuk meyakinkan target bahwa Indonesia secara serius menegakkan kedaulatan teritorialnya dengan melakukan pembakaran dan penembakan kapal asing sehingga diharapkan memberikan efek jera dalam kegiatan *illegal fishing* (Nugraha et al, 2016). Maraknya kegiatan *Illegal Unreported and Unregulated* (IUU) Fishing yang terjadi di Indonesia semakin merugikan Indonesia. Kerugian tersebut berdampak pada ancaman mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dimasa yang akan datang. Berikut beberapa faktor terjadinya *Illegal Fishing* di Indonesia.

Indonesia dengan Amerika Serikat sudah menjalin hubungan kerjasama sejak dulu. Kedua negara ini tetap terus menjaga hubungan baik. Dalam menjaga hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat perlu adanya keharmonisan atau saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Untuk itu pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dalam bidang maritim dengan Amerika Serikat karena Amerika Serikat memiliki teknologi dan keamanan laut yang memadai dan canggih sehingga dapat membantu Indonesia dalam mewujudkan poros maritim dunia.

Kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat tersebut sebagai upaya untuk mencegah permasalahan *Illegal Fishing* yang semakin memburuk dengan meningkatkan pengawasan di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau. Salah satu kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Amerika Serikat yaitu dengan pengadaan teknologi dimana Badan Nasional dan Kelautan Atmosferik (NOAA) Amerika bekerjasama dengan kemitraan yang ada di Indonesia untuk meneliti fenomena alam laut seperti gempa, cuaca ekstrem dan fenomena oseanografi lainnya. Selain itu *Oceans and Fisheries Partnership* (USAID/Oceans) dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat dan Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia

(MDPI) menjalin mitra kerjasama dalam menurunkan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak mengikuti peraturan (IUU). Melalui kemitraan ini, USAID Oceans dan MDPI mengembangkan sistem yang inovatif untuk melestarikan keanekaragaman hayati laut. Sistem tersebut adalah *Catch Documentation and Traceability* (CDT) merupakan sebuah alat elektronik yang dapat memantau rantai makanan habitat laut, dapat mengumpulkan dan melakukan validasi data utama produk tuna, termasuk legalitas dan pergerakannya, dari tempat penangkapannya hingga sampai ke konsumen akhir.

Selain itu kedua negara bekerjasama perihal keamanan Kawasan dimana *U.S. Coast Guard* dan *Program Export Control and Related Border Security Program* Departemen Luar Negeri AS menyelenggarakan pelatihan untuk petugas penjaga pantai. Program Keamanan Pelabuhan Internasional dari *US Coast Guard* juga melakukan peningkatan kapasitas untuk memenuhi standar Keamanan kapal dan pelabuhan. Pada 19 September 2014, 24 petugas KPLP (Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai) Indonesia menyelesaikan pelatihan *Boarding Officer Course* selama 2 minggu dibawah bimbingan empat instruktur dari *U.S. Coast Guard*.